

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Proses Audit Kinerja

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 11

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Rahma Noviyana | 2313031060 |
| 2. Annisa Yulianti | 2313031062 |

**PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Proses Audit Kinerja. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Proses Audit Kinerja.

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A., dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami mengenai materi yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 15 November 2025

Kelompok 11

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Pengertian Audit Kinerja	3
2.2 Karakteristik Audit Kinerja.....	4
2.3 Jenis-jenis Audit Kinerja	7
2.4 Pemeriksaan Kinerja dan Standar Audit Kinerja	9
2.5 Proses dan Tahapan Audit Kinerja	11
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Kesimpulan	14
3.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
STUDI KASUS	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit kinerja adalah suatu metode sistematis untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan dapat memberikan hasil yang optimal serta memperbaiki proses dan hasil yang dicapai. Dengan melaksanakan audit kinerja, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan berkelanjutan.

Pentingnya audit kinerja sangat terlihat dalam berbagai sektor, baik itu organisasi pemerintah, swasta, maupun nirlaba. Dalam sektor publik, audit kinerja membantu memastikan bahwa anggaran publik dikelola dengan efektif dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk sektor swasta, audit ini mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien dan peningkatan daya saing. Sedangkan untuk organisasi nirlaba, audit kinerja memastikan bahwa dana dari donor digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan.

Namun, pelaksanaan audit kinerja tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala umum termasuk keterbatasan dalam pengumpulan data, resistensi terhadap perubahan, serta kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja yang tepat. Seiring perkembangan regulasi dan praktik terbaik, metodologi audit kinerja juga terus berkembang. Adanya standar dan regulasi yang mengatur audit kinerja memberikan kerangka kerja yang penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan cara yang efektif dan konsisten.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini, diantaranya:

1. Apa itu pengertian dari proses audit kinerja?
2. Apa saja yang termasuk karakteristik dari audit kinerja?
3. Apa saja jenis-jenis audit kinerja?

4. Apa itu pemeriksaan kinerja dan standar audit kinerja?
5. Bagaimana proses dan tahapan audit kinerja?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini, diantaranya:

1. Mengetahui dan memahami pengertian dari proses audit kinerja
2. Mengetahui dan memahami karakteristik proses audit kinerja
3. Mengetahui dan memahami jenis-jenis audit kinerja
4. Mengetahui dan memahami pemeriksaan kinerja dan standar audit kinerja
5. Mengetahui dan memahami proses dan tahapan audit kinerja

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Audit Kinerja

Secara etimologis, istilah audit kinerja terdiri dari dua kata, yaitu “audit” dan “kinerja.” Oleh karena itu, sebelum memahami makna audit kinerja secara menyeluruh, penting untuk memahami definisi masing-masing istilah. Kata “audit” secara umum dipahami sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang dilakukan oleh pihak yang kompeten, independen, dan objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang telah ditetapkan. Arens, Elder, dan Beasley (2017) mendefinisikan audit sebagai *“a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to determine the degree of correspondence between those assertions and established criteria.”* Definisi ini menegaskan bahwa audit bukan sekadar proses pemeriksaan, melainkan sebuah kegiatan penilaian berbasis bukti dengan standar tertentu.

Sementara itu, istilah “kinerja” merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang diperoleh suatu organisasi, unit, atau individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Mahmudi (2020), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan menghasilkan *output*, *outcome*, dan manfaat yang diharapkan.

Mengacu pada kedua konsep tersebut, audit kinerja dapat dipahami sebagai suatu proses sistematis, terstruktur, dan objektif untuk mendapatkan, mengukur, dan mengevaluasi bukti atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan tiga aspek *utama*, yaitu ekonomi (*economic*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*), atau sering disebut sebagai prinsip *value for money*. Selain menilai proses dan hasil, audit kinerja juga berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan standar operasional yang berlaku.

Secara keseluruhan, audit kinerja dapat disimpulkan sebagai pemeriksaan menyeluruh yang tidak hanya menilai apakah tujuan organisasi tercapai, tetapi

juga bagaimana pencapaian tersebut diraih, apakah penggunaan sumber daya sudah tepat, serta sejauh mana kegiatan memberikan manfaat yang sesuai dengan rencana. Audit kinerja bukan hanya alat kontrol, tetapi juga instrumen pembelajaran bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola.

2.2 Karakteristik Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan suatu evaluasi yang menilai sejauh mana organisasi menjalankan kegiatan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Karakteristik audit kinerja berbeda dari audit keuangan maupun audit kepatuhan karena fokus utamanya bukan sekadar memeriksa laporan atau aturan, tetapi menilai kualitas pengelolaan sumber daya dan pencapaian hasil. Audit kinerja menekankan apakah penggunaan sumber daya telah menghasilkan manfaat optimal bagi organisasi dan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), audit kinerja menilai tiga aspek utama, yaitu ekonomi dalam pengadaan input, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, serta efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Ketiga prinsip ini menjadi pondasi dalam menilai apakah suatu kegiatan telah memberikan nilai tambah (*value for money*). Dengan demikian, karakteristik audit kinerja tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis dan rekomendatif. Auditor tidak hanya melaporkan temuan, tetapi memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Prinsip 3E ini kemudian dijadikan alat utama untuk mengukur apakah suatu organisasi telah menjalankan kegiatannya secara optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Ekonomi memengaruhi biaya input, efisiensi memengaruhi proses, dan efektivitas memengaruhi hasil akhir. Jika ketiganya baik, maka organisasi dapat dikatakan menjalankan program yang memberikan nilai uang (*value for money*).

1. Ekonomi (*Economy*)

Aspek ekonomi dalam audit kinerja berhubungan dengan kemampuan organisasi memperoleh input baik berupa barang, jasa, maupun tenaga kerja dengan kualitas yang sesuai pada harga serendah mungkin.

Ekonomi tidak berarti sekadar membeli yang paling murah, tetapi bagaimana suatu organisasi melakukan pengadaan yang hemat tanpa mengorbankan standar mutu yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2018), ekonomi adalah "kemampuan organisasi memperoleh masukan dengan kualitas tertentu pada harga yang paling murah." Pernyataan ini menegaskan bahwa ekonomi mencakup penghematan biaya dan ketepatan dalam proses pengadaan. Auditor menilai apakah pembelian atau penggunaan anggaran sudah dilakukan secara hemat, wajar, dan sesuai prosedur. Dalam audit ekonomi, auditor akan menganalisis berbagai komponen, seperti:

- Mekanisme pengadaan barang dan jasa,
- Kesesuaian harga dengan pasar,
- Adanya potensi pemborosan atau mark-up,
- Ketepatan pemilihan pemasok,
- Kualitas input yang diperoleh.

Jika organisasi mampu memperoleh input dengan teknis dan harga yang optimal, maka organisasi tersebut telah memenuhi prinsip ekonomi. Namun jika ditemukan pemborosan, pengeluaran tidak wajar, atau pemilihan pemasok tidak transparan, maka organisasi dianggap tidak ekonomis.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengolah input menjadi output secara optimal. Efisiensi berkaitan dengan proses internal organisasi dan mengukur sejauh mana sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai hasil.

Menurut Mardiasmo (2018), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran, di mana sumber daya digunakan secara optimal. Dengan kata lain, suatu proses dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan maksimal dengan input yang minimal. Audit efisiensi mencakup pemeriksaan atas hal-hal berikut:

- Prosedur kerja yang digunakan,
- Pemanfaatan tenaga kerja, waktu, dan peralatan,

- Kesesuaian proses operasional dengan standar,
- Produktivitas sumber daya,
- Tingkat *idle capacity* atau sumber daya yang menganggur,
- Kecepatan dan ketepatan proses pelaksanaan program.

Auditor akan melihat apakah organisasi menggunakan sumber daya secara bijaksana dan apakah ada cara yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan. Ketidakefisienan biasanya terjadi karena prosedur kerja yang tidak jelas, pemborosan waktu, penggunaan tenaga kerja yang berlebihan, atau pengadaan peralatan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi sangat terkait dengan nilai uang karena meskipun input diperoleh secara ekonomis, proses yang tidak efisien dapat menyebabkan biaya membengkak dan tujuan tidak tercapai.

3. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas merupakan prinsip yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya menilai output, tetapi juga *outcome* manfaat nyata bagi masyarakat atau pengguna layanan.

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang direncanakan. Ini berarti auditor harus menilai apakah program atau kegiatan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam audit efektivitas, auditor menilai:

- Kesesuaian antara tujuan dan hasil,
- Indikator kinerja utama (iku) dan indikator kinerja program (ikp),
- Kualitas output yang dihasilkan,
- Dampak kegiatan terhadap masyarakat,
- Tingkat pencapaian target fisik maupun anggaran,
- Perbandingan antara rencana dan realisasi.

Organisasi dapat dikatakan efektif jika hasilnya memberikan manfaat yang sesuai dengan misi dan tujuannya. Jika output banyak tetapi tidak berdampak, maka program belum efektif. Oleh karena itu, efektivitas lebih

menekankan pada kualitas dan keberhasilan jangka panjang dibandingkan sekadar pencapaian kuantitatif.

2.3 Jenis-jenis Audit Kinerja

Menurut Mardiasmo (2018), audit sektor publik terdiri atas tiga jenis utama, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Ketiga jenis audit ini menjadi pilar utama dalam sistem pengawasan publik karena masing-masing memberikan kontribusi berbeda terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Meskipun berbeda fokus, ketiganya saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka pengawasan yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi sektor publik.

1. Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan pemeriksaan yang berorientasi pada penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Audit ini memastikan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), apakah sistem pengendalian intern berjalan memadai, serta apakah transaksi keuangan dicatat dan diotorisasi secara benar. Dalam perspektif, Audit keuangan tidak hanya bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan, tetapi juga mendorong peningkatan disiplin fiskal dan tertib administrasi. Melalui audit keuangan, auditor dapat mengidentifikasi ketidakteraturan, kelemahan sistem, atau potensi kecurangan yang bisa mengganggu integritas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, audit keuangan memiliki kontribusi penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan dan dicatat secara akuntabel.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan berfungsi menilai sejauh mana aktivitas pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, pedoman, prosedur, dan regulasi lain yang berlaku. Audit ini sangat penting dalam konteks birokrasi Indonesia yang sarat dengan aturan formal, di mana

kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu indikator penting tata kelola yang baik. Audit kepatuhan tidak hanya memeriksa kesesuaian formal, tetapi juga memuat unsur kepatutan administratif, yaitu penilaian terhadap kewajaran dan keluhuran tindakan aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan. Artinya, pengambilan keputusan harus tidak hanya patuh pada aturan tertulis, tetapi juga sesuai etika birokrasi dan tidak merugikan masyarakat. Audit kepatuhan ini memastikan agar kebijakan publik diimplementasikan dengan benar serta tidak terjadi penyimpangan prosedural yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

3. Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan jenis audit yang paling luas cakupannya karena memeriksa kinerja organisasi berdasarkan prinsip *value for money*, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit kinerja menilai apakah suatu program menggunakan sumber daya secara hemat (ekonomi), apakah proses pelaksanaan program dilakukan secara optimal (efisiensi), dan apakah output serta hasil program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (efektivitas). Pemeriksaan ini juga tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menelaah penyebab ketidakcapaian target, kelemahan proses, struktur organisasi, serta kesesuaian strategi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, audit kinerja membantu memastikan bahwa program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja merupakan satu kesatuan sistem pengawasan publik. Audit keuangan menjaga integritas laporan, audit kepatuhan memastikan bahwa kegiatan pemerintah berada dalam koridor hukum dan etika, sementara audit kinerja memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien. Ketiga audit tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan responsif serta dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2.4 Pemeriksaan Kinerja dan Standar Audit Kinerja

1. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu bentuk pemeriksaan sektor publik yang menilai sejauh mana suatu entitas pemerintah melaksanakan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berhemat berdasarkan prinsip *value for money*. Pemeriksaan ini bertujuan memberikan penilaian objektif dan independen terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan yang dibiayai oleh keuangan negara. Menurut Mardiasmo (2018), Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, serta aspek ekonomis suatu kegiatan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

Dalam konteks sektor publik, pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menilai bukti secara sistematis agar auditor dapat memberikan simpulan yang meyakinkan mengenai penyebab keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Pemeriksaan ini tidak hanya memotret hasil akhir, tetapi juga menilai proses pelaksanaan, mekanisme penganggaran, kualitas pengendalian intern, dan faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja. Melalui pemeriksaan kinerja, auditor berperan membantu pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan program publik, mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif, serta mengidentifikasi potensi pemborosan atau penyimpangan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

2. Standar Audit Kinerja

Standar audit kinerja di Indonesia mengikuti ketentuan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN memberikan pedoman dan kerangka kerja bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang berkualitas, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara garis besar, standar audit kinerja menurut SPKN (2017) meliputi:

a. Standar Umum

Standar ini berkaitan dengan kualitas profesional auditor dan organisasi pemeriksa. Auditor kinerja wajib:

- kompeten dalam bidang pemeriksaan kinerja,
- bersikap independen,
- menjaga integritas dan objektivitas,
- menggunakan kecermatan profesional (*due professional care*),
- serta mematuhi kode etik pemeriksaan.

Standar umum juga mengatur persyaratan kelembagaan agar pemeriksaan dilakukan secara bebas dari intervensi, baik dari pihak yang diperiksa maupun pihak lain yang berkepentingan.

b. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan mengatur proses dan prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan. Pemeriksaan kinerja wajib dilaksanakan melalui tahapan:

- Perencanaan pemeriksaan, yang mencakup identifikasi risiko, penentuan tujuan pemeriksaan, pemilihan metodologi, dan pemahaman mendalam atas program.
- Pelaksanaan pemeriksaan, termasuk pengumpulan bukti, pengujian kinerja, analisis akar masalah, serta penilaian atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
- Pengembangan temuan pemeriksaan, yaitu merumuskan kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi perbaikan.

SPKN menekankan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis, berdasarkan bukti yang dapat diandalkan, serta menggunakan metode analisis yang sesuai.

c. Standar Pelaporan

Standar pelaporan mengatur sistematika dan kualitas laporan hasil pemeriksaan (LHP). Auditor wajib:

- menyajikan laporan secara jelas, lengkap, dan objektif,

- menjelaskan temuan, simpulan, dan rekomendasi secara logis,
- memberikan penilaian berbasis bukti,
- menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja harus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja program, termasuk akar permasalahan dan langkah perbaikan yang diperlukan.

2.5 Proses dan Tahapan Audit Kinerja

Menurut Sulila (2008), proses dan tahapan audit kinerja antara lain:

1. Proses dan Struktur Audit Kinerja

Pada dasarnya ditur audit baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit yang lainnya terletak pada tugas-tugas spesifik (*specific tasks*) pada masing-masing tahap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Secara umum, struktur audit terdiri atas:

- a. Tahap-tahap audit
- b. Elemen masing-masing tahap audit;
- c. Tujuan umum masing-masing elemen; dan
- d. Tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan.

2. Tahapan Audit Kinerja

Audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas:

1. Tahap pengenalan dan perencanaan (*familiarization and planning phase*)
 - a. Survei Pendahuluan (*Preliminary Survey*)
Survei pendahuluan, bertujuan untuk menghasilkan research plan yang detail yg dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja.

Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan:

- 1) Struktur dan operasi organisasi
- 2) Lingkungan manajemen
- 3) Kebijakan, standar, dan prosedur kerja

Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berbagai hal yang bersifat material, mendesain tugas secara efisien dan menghindari kesalahan.

b. Review Sistem Pengendalian (*Control System Review*)

Review SPM, bertujuan untuk mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada audit keuangan, audit dimulai dengan review dan evaluasi terhadap SPI terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Pada audit kinerja, auditor harus menelaah SPM untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen dan untuk luas, sifat dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya SPM memberikan gambaran tentang metoda dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengendalikan kinerjanya. Pengendalian manajemen bertujuan utk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai secara ekonomis, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tiga langkah prosedur audit yang dilakukan pada *review* sistem pengendalian:

- 1) Menganalisis sistem manajemen organisasi
- 2) Membandingkannya dengan model yang ada.
- 3) Mencatat dugaan terhadap setiap ketidaksesuaian

2. Tahap pengauditan (*audit phase*)

Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu:

- 1) Telaah hasil-hasil program (*program results review*)
- 2) Telaah ekonomi dan efisiensi (*economy and efficiency review*)
- 3) Telaah kepatuhan (*compliance review*)

Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja.

3. Tahap Pelaporan (*reporting phase*)

Penyusunan laporan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan informasi, rekomendasi, dan penilaian yang independen bagi pengguna laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa dengan harapan agar terjadi perubahan positif bagi kinerja entitas tersebut di masa datang. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaporan adalah:

- a) Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan
- b) Perolehan tanggapan atas rekomendasi
- c) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan

4. Tahap penindaklanjutan (*follow-up phase*)

Meliputi Desain *Follow-up*, Investigasi, dan Pelaporan. Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja, serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian manajemen.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Pemeriksaan kinerja adalah: penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas atas suatu program/kegiatan/organisasi yang dilakukan oleh pihak yang independen dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja. Audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika: Struktur audit kinerja, Tahapan audit kinerja dan Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja. Berdasarkan kerangka umum struktur audit di atas, dapat dikembangkan struktur audit kinerja yang terdiri atas:

- a. Tahap pengenalan dan perencanaan (*familiarization and planning phase*)
- b. Tahap pengauditan (*audit phase*)
- c. Tahap pelaporan (*reporting phase*)
- d. Tahap penindaklanjutan (*follow-up phase*)

3.2 Saran

Dalam penyusunan makalah ini tentunya masih banyak kekurangan baik dalam segi struktur makalah ataupun kelengkapan isi materi yang dibahas. Namun, hal tersebut harus diperbaiki kedepannya agar lebih baik lagi, sehingga materi dapat tersampaikan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, kami menantikan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A., Elder, R., & Beasley, M. (2017). *Auditing and Assurance Services*. Pearson Education.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (edisi terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sulila, I. (2008). Audit Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Inovasi*, 5(2).

STUDI KASUS

Provinsi Lampung, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Audit kinerja akuntansi sektor publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Namun, yang terjadi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan yang cukup signifikan. Hal ini memicu kekhawatiran publik dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit kinerja terhadap Dinas Pendidikan.

Pertanyaan

1. Metode audit apa yang paling relevan untuk mengungkap penyimpangan dalam kasus ini?
2. Rekomendasi perbaikan atau solusi apa yang dapat diberikan berdasarkan hasil audit?